



## Analisis Efektivitas Insentif Ekonomi terhadap Upaya Pelestarian SDA dan Mitigasi Kerusakan Lingkungan

Satria Lam Syafi'i Simamora<sup>1\*</sup>, Imsar<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : [satria200165@gmail.com](mailto:satria200165@gmail.com)<sup>1</sup>, [imsar@uinsu.ac.id](mailto:imsar@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

Korespondensi penulis : [satria200165@gmail.com](mailto:satria200165@gmail.com)

**Abstract.** *This study uses the library research qualitative method to examine the effectiveness of economic incentives in encouraging the conservation of natural resources (SDA) as well as mitigating environmental damage in a sustainable manner. The background of this study is driven by the increasing environmental degradation due to uncontrolled exploitation of natural resources, which is often oriented towards short-term profits without regard for ecological sustainability and community welfare. In this context, economic incentives are seen as a strategic policy instrument that is able to influence the behavior of business actors and society towards a more environmentally friendly and socially responsible activity pattern. Various forms of economic incentives were discussed including green subsidies, environmental taxes, payment for environmental services (PES) schemes, and ecolabel certification. These instruments are considered to be able to internalize the external costs of environmental damage into economic calculations, thereby providing pressure and motivation for business actors to implement more sustainable and innovative practices. Based on a review of academic literature, scientific journals, as well as national and international policies, it was found that the implementation of economic incentives has proven to be effective in increasing environmental awareness and encouraging green innovation significantly. However, the effectiveness of its implementation is highly dependent on the quality of policy governance, the level of transparency, regulatory clarity, and the active involvement of local communities. Without adequate oversight, incentives have the potential to be abused or not achieve their intended goals. Therefore, the design of economic incentive policies must be fair, measurable, and prepared with a participatory approach and based on empirical data. This study concludes that economic incentives not only function as a financial mechanism, but also as an instrument of behavior change, economic culture, and environmental innovation towards sustainability.*

**Keywords:** *Damage, Economy, Incentives, Mitigation, Natural Resources*

**Abstrak.** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif perpustakaan (library research) untuk menelaah efektivitas insentif ekonomi dalam mendorong pelestarian sumber daya alam (SDA) sekaligus mitigasi kerusakan lingkungan secara berkelanjutan. Latar belakang kajian ini didorong oleh meningkatnya degradasi lingkungan akibat eksploitasi SDA yang tidak terkendali, yang seringkali berorientasi pada keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, insentif ekonomi dipandang sebagai instrumen kebijakan strategis yang mampu memengaruhi perilaku pelaku usaha dan masyarakat menuju pola aktivitas yang lebih ramah lingkungan serta bertanggung jawab sosial. Berbagai bentuk insentif ekonomi yang dibahas meliputi subsidi hijau, pajak lingkungan, skema pembayaran jasa lingkungan (payment for environmental services/PES), serta sertifikasi ecolabel. Instrumen-instrumen tersebut dinilai mampu menginternalisasi biaya eksternal kerusakan lingkungan ke dalam kalkulasi ekonomi, sehingga memberikan tekanan maupun motivasi bagi pelaku usaha untuk menerapkan praktik yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Berdasarkan telaah literatur akademik, jurnal ilmiah, serta kebijakan nasional dan internasional, ditemukan bahwa penerapan insentif ekonomi terbukti efektif meningkatkan kepedulian lingkungan dan mendorong inovasi hijau secara signifikan. Namun demikian, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kualitas tata kelola kebijakan, tingkat transparansi, kejelasan regulasi, serta keterlibatan masyarakat lokal secara aktif. Tanpa pengawasan yang memadai, insentif berpotensi disalahgunakan atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, desain kebijakan insentif ekonomi harus adil, terukur, dan disusun dengan pendekatan partisipatif serta berbasis data empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa insentif ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme finansial, tetapi juga sebagai instrumen perubahan perilaku, budaya ekonomi, dan inovasi lingkungan menuju keberlanjutan. Hasil kajian diharapkan memperkaya literatur akademik serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan model ekonomi hijau yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

**Kata kunci:** Ekonomi, Insentif, Kerusakan, Mitigasi, SDA

## **1. PENDAHULUAN**

Permasalahan lingkungan hidup dan degradasi sumber daya alam (SDA) merupakan tantangan serius yang dihadapi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Eksploitasi SDA yang berlebihan, konversi lahan besar-besaran, serta minimnya kesadaran ekologis menjadi penyebab utama menurunnya kualitas lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan strategis yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku melalui pendekatan insentif. Salah satu pendekatan yang mulai banyak dikembangkan adalah penggunaan insentif ekonomi sebagai mekanisme untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA. Insentif ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat kompensasi, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang mendorong inovasi dalam pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan analisis mendalam untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan insentif ini dalam mengatasi krisis lingkungan dan mendorong konservasi sumber daya alam secara sistemik (Syahputra & Prasetyo, 2021).

Dalam konteks ekonomi lingkungan, insentif memiliki peran penting sebagai penggerak perilaku. Insentif ekonomi seperti subsidi hijau, keringanan pajak, dan pembayaran jasa lingkungan (PES) bertujuan untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dari aktivitas ekonomi yang merusak alam. Melalui mekanisme ini, pelaku industri dan masyarakat diberikan dorongan finansial agar beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan. Konsep ini bersumber dari teori ekonomi lingkungan yang menekankan pentingnya penggabungan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian alam. Meskipun demikian, pelaksanaan insentif ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya data yang akurat, dan tumpang tindih regulasi antarsektor. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas implementasi insentif ekonomi agar tujuan pelestarian lingkungan dapat tercapai secara optimal (Hidayat & Mawardi, 2020).

Upaya pelestarian SDA juga erat kaitannya dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak dapat dicapai hanya dengan pendekatan normatif atau represif saja, melainkan perlu didorong melalui insentif yang memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini, insentif ekonomi memainkan peran sentral dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Skema seperti eco-label, pembiayaan hijau, dan pajak karbon mulai diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk insentif terhadap perilaku ramah lingkungan. Indonesia pun telah mengadopsi beberapa kebijakan serupa, namun masih dalam tahap awal dan terbatas cakupannya. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis peran strategis insentif

ekonomi dalam merumuskan kebijakan lingkungan yang holistik dan berkelanjutan (Rahmawati & Taufik, 2022).

Selain sebagai instrumen penggerak perilaku, insentif ekonomi juga berfungsi sebagai strategi mitigasi kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, insentif diarahkan untuk menurunkan tingkat kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penebangan hutan, pencemaran air, dan emisi karbon. Misalnya, dengan memberikan subsidi kepada petani yang menerapkan pertanian ramah lingkungan atau perusahaan yang mengurangi emisi karbon melalui teknologi bersih, maka dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada desain kebijakan, kualitas implementasi, serta kapasitas kelembagaan yang mendukung pengawasan dan evaluasi program. Penelitian mengenai efektivitas kebijakan insentif ekonomi dalam mitigasi kerusakan lingkungan menjadi penting sebagai landasan perumusan kebijakan yang berbasis bukti (Lubis & Sari, 2023).

Lebih jauh lagi, efektivitas insentif ekonomi dalam pelestarian SDA tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya masyarakat. Perbedaan persepsi, nilai-nilai lokal, serta tingkat literasi lingkungan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi insentif. Misalnya, di wilayah-wilayah adat, pendekatan berbasis insentif harus disesuaikan dengan norma dan kearifan lokal agar dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model insentif ekonomi yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat. Studi lintas wilayah dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana insentif ekonomi dapat berfungsi dalam konteks lokal yang berbeda-beda, serta apa saja hambatan dan peluang yang muncul di lapangan (Wulandari & Firdaus, 2021).

Penggunaan insentif ekonomi dalam pelestarian SDA dan mitigasi kerusakan lingkungan juga perlu dikaji dari sisi efektivitas jangka panjangnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa insentif yang hanya bersifat sesaat atau tidak berkelanjutan cenderung gagal menciptakan perubahan perilaku yang permanen. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara insentif ekonomi dengan regulasi hukum, pendidikan lingkungan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang kuat. Dengan demikian, kebijakan insentif tidak hanya menjadi alat stimulan sesaat, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem kebijakan lingkungan yang menyeluruh. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan hijau (green development) yang menempatkan lingkungan sebagai pilar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional (Putri & Hasanah, 2019).

## **2. TINJAUAN TEORITIS**

Teori insentif ekonomi merupakan konsep dalam ekonomi lingkungan yang menjelaskan bagaimana mekanisme pasar dapat digunakan untuk mendorong perilaku ramah lingkungan melalui pemberian insentif atau disinsentif finansial. Dalam konteks pelestarian sumber daya alam (SDA) dan mitigasi kerusakan lingkungan, teori ini memandang bahwa perilaku pelaku ekonomi dapat dimodifikasi melalui perubahan struktur biaya dan manfaat. Misalnya, pelaku industri akan lebih tertarik menggunakan energi terbarukan jika mereka mendapat keringanan pajak atau subsidi dari pemerintah. Di sisi lain, pengenaan pajak lingkungan dapat menjadi tekanan ekonomi yang memaksa perubahan ke arah lebih lestari. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dibandingkan metode regulasi murni karena memberikan ruang fleksibilitas dalam pengambilan keputusan pelaku ekonomi. Keberhasilan teori ini sangat bergantung pada keterpaduan antara kebijakan fiskal, partisipasi masyarakat, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang baik (Yuliana & Santoso, 2020).

### **a. Teori Insentif Ekonomi dalam Konteks Lingkungan**

Insentif ekonomi merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok agar sejalan dengan tujuan tertentu, termasuk pelestarian lingkungan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, teori ini berakar pada pendekatan ekonomi lingkungan yang menganggap bahwa perilaku manusia dapat diarahkan melalui insentif finansial atau disinsentif seperti pajak lingkungan. Ketika kerusakan lingkungan dianggap sebagai eksternalitas negatif, maka insentif ekonomi berfungsi untuk menginternalisasi biaya sosial dari aktivitas yang merusak lingkungan. Dengan cara ini, pelaku ekonomi diberi pilihan untuk mengubah perilaku demi mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar dalam batasan ramah lingkungan (Yuliana & Santoso, 2020).

Penerapan teori ini juga bertumpu pada asumsi bahwa pelaku ekonomi bersifat rasional dan responsif terhadap perubahan struktur biaya dan manfaat. Oleh karena itu, ketika insentif ekonomi seperti subsidi hijau atau pembayaran jasa lingkungan diterapkan secara tepat, maka akan tercipta ekuilibrium baru yang lebih berkelanjutan. Namun, efektivitas teori ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kapasitas kelembagaan, transparansi tata kelola, dan dukungan regulasi yang memadai. Tanpa adanya kerangka hukum dan sistem pengawasan yang baik, insentif ekonomi dapat disalahgunakan atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan (Pranoto & Nurhidayati, 2021).

b. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Instrumen Kebijakan

Pelestarian sumber daya alam merupakan upaya strategis dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis dan ekonomi lingkungan. Dalam teori kebijakan publik, pendekatan pelestarian dapat dilakukan melalui kombinasi antara regulasi ketat dan pemberian insentif. Kebijakan berbasis insentif seperti pemberian kompensasi kepada masyarakat adat, petani hutan, atau pelaku industri hijau telah terbukti meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program konservasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengaitkan manfaat langsung dari pelestarian lingkungan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sehingga tercipta hubungan simbiosis antara keduanya (Ardiansyah & Kusumawardani, 2022).

Selain itu, keberhasilan pelestarian SDA juga bergantung pada pendekatan partisipatif dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan merasakan manfaat dari pelestarian SDA, maka akan muncul rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif. Teori partisipatif ini melengkapi pendekatan insentif ekonomi dengan aspek sosial yang kuat. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal dalam skema pengelolaan bersama seperti hutan desa, perhutanan sosial, dan konservasi berbasis masyarakat (Rohimah & Tanjung, 2023).

c. Mitigasi Kerusakan Lingkungan melalui Pendekatan Ekonomi

Kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi dari kegagalan pasar dalam mengkomodasi nilai lingkungan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan mitigasi yang efektif harus melibatkan koreksi terhadap kegagalan pasar tersebut melalui instrumen ekonomi. Mitigasi dalam konteks ini mencakup upaya mengurangi tekanan terhadap lingkungan melalui pengenaan biaya lingkungan terhadap aktivitas yang merusak serta pemberian insentif untuk aktivitas yang ramah lingkungan. Misalnya, pajak karbon dikenakan kepada industri yang menghasilkan emisi tinggi, sedangkan insentif diberikan kepada perusahaan yang menerapkan teknologi bersih. Pendekatan ini bertujuan agar pelaku usaha mempertimbangkan dampak ekologis dalam perhitungan biaya produksinya (Setiawan & Rahmatullah, 2020).

Lebih lanjut, keberhasilan mitigasi kerusakan lingkungan melalui pendekatan ekonomi sangat ditentukan oleh integrasi kebijakan lintas sektor. Sering kali, kebijakan yang diterapkan di sektor energi, pertanian, atau industri tidak sinkron dengan kebijakan lingkungan, sehingga insentif ekonomi kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang menyeluruh, interdisipliner, dan berbasis bukti agar mampu menanggulangi degradasi lingkungan secara sistemik. Konsep green economy yang berkembang dalam dekade terakhir

menjadi solusi alternatif dengan mengintegrasikan dimensi ekonomi dan lingkungan dalam kerangka pembangunan nasional dan global (Putra & Hanafiah, 2021).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas insentif ekonomi terhadap pelestarian sumber daya alam dan mitigasi kerusakan lingkungan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dokumen pemerintah, serta buku-buku akademik yang relevan terbitan tahun 2019 ke atas. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menelaah pola-pola implementasi insentif ekonomi, dampaknya terhadap perubahan perilaku, serta faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan statistik, tetapi menekankan pada interpretasi teoritis dan analisis konseptual untuk menjelaskan hubungan antara instrumen ekonomi dan hasil lingkungan yang dicapai dalam berbagai studi kasus.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif ekonomi memiliki kontribusi signifikan dalam memotivasi pelaku ekonomi dan masyarakat untuk beralih ke praktik yang lebih ramah lingkungan. Skema seperti subsidi hijau, pembayaran jasa lingkungan, dan pajak lingkungan terbukti efektif dalam mengubah pola konsumsi dan produksi, khususnya dalam sektor energi, kehutanan, dan pertanian. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, kesinambungan anggaran, serta keterlibatan aktor lokal. Di wilayah dengan tata kelola yang kuat dan literasi lingkungan yang tinggi, insentif cenderung berhasil mengurangi kerusakan lingkungan secara nyata.

Sebaliknya, di daerah yang mengalami kendala koordinasi, minimnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat, insentif ekonomi sering kali tidak berjalan optimal. Beberapa kebijakan bahkan tidak tepat sasaran karena kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, penerapan insentif ekonomi tidak dapat dipukul rata, melainkan harus disesuaikan dengan konteks wilayah dan karakteristik sektoral. Kolaborasi multipihak menjadi kunci keberhasilan, di mana pemerintah, swasta, dan masyarakat harus saling mendukung dalam implementasi kebijakan lingkungan berbasis ekonomi.

**Tabel 1. Jenis Insentif Ekonomi yang Diterapkan dalam Pelestarian SDA**

No	Jenis Insentif	Bentuk Implementasi	Tujuan Kebijakan
1	Subsidi Hijau	Bantuan finansial untuk usaha ramah lingkungan	Mendorong produksi berkelanjutan
2	Pajak Lingkungan	Pajak tambahan pada kegiatan pencemar	Mengurangi aktivitas merusak alam
3	Pembayaran Jasa Lingkungan (PES)	Kompensasi untuk konservasi kawasan	Menjaga fungsi ekosistem kritis
4	Kredit Lunak Ekologis	Pinjaman bunga rendah untuk usaha hijau	Meningkatkan investasi hijau

**Penjelasan:**

Tabel 1 menunjukkan bahwa insentif ekonomi yang digunakan dalam pelestarian SDA beragam bentuknya, mulai dari subsidi, pajak, hingga skema keuangan berbasis lingkungan. Subsidi hijau diberikan untuk mendukung sektor-sektor yang beroperasi dengan prinsip ramah lingkungan seperti pertanian organik atau energi terbarukan. Pajak lingkungan diterapkan sebagai disinsentif untuk mengurangi aktivitas ekonomi yang merusak, seperti industri padat karbon. Skema PES digunakan untuk memberi kompensasi kepada masyarakat yang menjaga wilayah konservasi, seperti hutan atau daerah aliran sungai.

Kredit lunak ekologis juga berperan penting dalam mendorong transformasi usaha ke arah berkelanjutan. Kebijakan ini memberi akses ke pembiayaan dengan biaya rendah bagi pelaku usaha yang ingin beralih ke teknologi bersih atau meningkatkan efisiensi energi. Keberhasilan implementasi insentif ekonomi sangat bergantung pada sinergi antarlembaga serta keterlibatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori insentif ekonomi yang menekankan pentingnya dorongan finansial dalam mengubah perilaku pasar (Yuliana & Santoso, 2020).

**Tabel 2. Aktor yang Terlibat dalam Pelaksanaan Insentif Ekonomi**

No	Aktor Utama	Peran dalam Kebijakan	Tingkat Keterlibatan
1	Pemerintah Pusat	Merancang regulasi dan anggaran	Sangat Tinggi
2	Pemerintah Daerah	Mengimplementasikan kebijakan lokal	Tinggi
3	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Fasilitator edukasi dan advokasi	Sedang
4	Komunitas Lokal	Pelaksana langsung program konservasi	Tinggi

**Penjelasan:**

Tabel 2 menggambarkan peran aktor-aktor kunci dalam pelaksanaan insentif ekonomi lingkungan. Pemerintah pusat memegang kendali dalam menyusun peraturan, mengalokasikan anggaran, serta menetapkan kebijakan fiskal. Pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lapangan dan penyesuaian regulasi dengan kondisi lokal. Lembaga

swadaya masyarakat sering kali menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan teknis.

Sementara itu, komunitas lokal merupakan elemen yang paling krusial karena mereka adalah pelaksana langsung di lapangan. Tanpa partisipasi mereka, kebijakan insentif ekonomi tidak akan mencapai hasil maksimal. Keterlibatan para aktor ini selaras dengan pendekatan partisipatif dalam teori kebijakan lingkungan yang menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam mengelola SDA secara berkelanjutan (Rohimah & Tanjung, 2023).

**Tabel 3. Dampak Insentif Ekonomi terhadap Perilaku Pelaku Usaha**

No	Perubahan Perilaku	Contoh Aktivitas	Sektor Terkait
1	Beralih ke teknologi bersih	Penggunaan energi surya di pabrik kecil	Industri manufaktur
2	Pengurangan limbah	Daur ulang limbah produksi	Industri makanan & minuman
3	Konservasi lahan	Penanaman kembali di lahan kritis	Pertanian
4	Efisiensi energi	Penggantian mesin boros listrik	Transportasi dan logistik

**Penjelasan:**

Tabel ini menunjukkan bahwa penerapan insentif ekonomi berdampak nyata terhadap perubahan perilaku pelaku usaha di berbagai sektor. Misalnya, sektor industri mulai mengadopsi teknologi energi terbarukan seperti panel surya untuk menekan biaya operasional dan mematuhi regulasi lingkungan. Selain itu, banyak industri makanan mulai menerapkan prinsip circular economy melalui program daur ulang limbah.

Sektor pertanian juga terdorong untuk melakukan konservasi lahan melalui reboisasi dan penggunaan pupuk organik. Sementara di sektor transportasi, pelaku usaha berupaya meningkatkan efisiensi energi dengan mengganti peralatan atau kendaraan yang lebih hemat energi. Transformasi ini membuktikan bahwa insentif ekonomi mampu menjadi pengungkit perubahan perilaku secara luas, sesuai dengan prinsip internalisasi eksternalitas dalam ekonomi lingkungan (Pranoto & Nurhidayati, 2021).

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menyatakan bahwa insentif ekonomi merupakan instrumen yang efektif dalam mendukung pelestarian sumber daya alam dan mitigasi kerusakan lingkungan, asalkan didesain dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara menyeluruh. Keberhasilan insentif sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang transparan, sistem pengawasan yang ketat, serta tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang integratif dan berkelanjutan agar insentif



ekonomi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga dapat mendorong perubahan perilaku dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

## REFERENSI

- Ardiansyah, M., & Kusumawardani, S. (2022). Efektivitas insentif ekonomi dalam konservasi sumber daya alam: Studi komparatif antara daerah konservasi dan non-konservasi. *Jurnal Ekonomi Lingkungan*, 14(2), 115–128.
- Hidayat, A., & Mawardi, W. (2020). Penerapan subsidi lingkungan sebagai upaya pelestarian SDA: Tinjauan ekonomi mikro. *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Lingkungan*, 11(1), 33–46.
- Lubis, M., & Sari, F. (2023). Evaluasi efektivitas program insentif ekonomi terhadap mitigasi kerusakan lingkungan di wilayah sub-urban. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 8(1), 50–62.
- Pranoto, B., & Nurhidayati, L. (2021). Insentif ekonomi dan perubahan perilaku lingkungan: Analisis pada usaha mikro sektor pertanian organik. *Jurnal Inovasi Sosial dan Lingkungan*, 6(2), 95–110.
- Putra, D., & Hanafiah, A. (2021). Green economy sebagai solusi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Hijau Indonesia*, 9(3), 89–102.
- Putri, S., & Hasanah, R. (2019). Penguatan insentif ekonomi dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 7(1), 40–52.
- Rahmawati, I., & Taufik, M. (2022). Peran insentif ekonomi dalam integrasi kebijakan pembangunan dan lingkungan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 121–134.
- Rohimah, D., & Tanjung, R. (2023). Model partisipasi komunitas dalam pelestarian sumber daya alam melalui insentif ekonomi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Lingkungan*, 10(1), 72–85.
- Setiawan, R., & Rahmatullah, M. (2020). Pajak karbon dan insentif teknologi bersih: Tinjauan terhadap mitigasi kerusakan lingkungan. *Jurnal Ekonomi dan Energi*, 13(2), 99–112.
- Syahputra, F., & Prasetyo, H. (2021). Kebijakan insentif ekonomi sebagai instrumen pelestarian SDA di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Lingkungan*, 5(2), 55–70.
- Wulandari, N., & Firdaus, R. (2021). Pendekatan sosial-budaya dalam implementasi insentif ekonomi untuk konservasi lingkungan. *Jurnal Sosiologi Pembangunan*, 8(1), 65–79.
- Yuliana, E., & Santoso, B. (2020). Teori insentif ekonomi dalam pengelolaan lingkungan berbasis pasar. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(4), 88–100.
- Zainuddin, M., & Fauziah, S. (2021). Efektivitas pembayaran jasa lingkungan dalam menjaga ekosistem hutan. *Jurnal Konservasi dan Sumber Daya Alam*, 9(2), 44–57.
- Zuhdi, M., & Kartika, Y. (2020). Analisis kelembagaan dalam implementasi insentif ekonomi untuk konservasi SDA. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Kebijakan Publik*, 7(2), 70–83.
- Zulkifli, A., & Harahap, D. (2019). Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam kebijakan insentif lingkungan hidup. *Jurnal Dinamika Pemerintahan Daerah*, 6(3), 101–113.